

**KAJIAN TERHADAP PERAN NOTARIS
SEBAGAI PENYIMPAN SURAT WASIAT
DI KABUPATEN SEMARANG**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2**

**Program Studi
MAGISTER KENOTARIATAN**

Oleh :

**R. ANDRE ARIYANDONO, SH
B4B 003 134**

**Pembimbing Utama :
YUNANTO, S.H. MHum**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

T E S I S

KAJIAN TERHADAP PERAN NOTARIS SEBAGAI PENYIMPAN SURAT WASIAT DI KABUPATEN SEMARANG

Disusun Oleh :

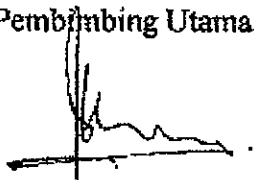
R. ANDRE ARIYANDONO, SH
B4B 003 134

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

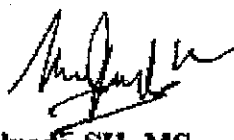
Mengetahui

Tanggal :

Pembimbing Utama,


Yunanto, SH. MHum
NIP. 131 689 627

Ketua Program Studi,


Mulvadi, SH. MS
NIP. 130 529 429

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Abstract	vi
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Notaris	7
1. Pengertian	7
2. Dasar Hukum	7
3. Syarat-syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris	7
4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan	8
5. Pemberhentian	13
B. Surat Wasiat	15
1. Dasar Hukum	15

2. Pengertian	15
3. Syarat-syarat Bagi Pembuat Wasiat.....	16
4. Syarat-syarat Bagi Penerima Wasiat	16
5. Perbedaan Surat Wasiat	17
6. Saksi	20
7. Syarat-syarat Wasiat	21
8. Pencabutan Surat Wasiat	26
9. Gugurnya Surat Wasiat	26
C. Notaris Sebagai Penyimpan Surat Wasiat	28
1. Dasar Hukum	28
2. Prosedur Penyimpanan Surat Wasiat Oleh Notaris	29
3. Kewajiban Notaris :	
- Terhadap Surat Wasiat yang Dibuat dan Disimpan ...	32
- Bila Pewaris meninggal dunia	33
4. Akibat Hukum bila Notaris melalaikan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat	34

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	36
E. Jenis Dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	39

G. Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Notaris Sebagai Penyimpan Surat Wasiat Agar Surat Wasiat Berlaku Sebagai Akta Otentik	42
B. Akibat Hukum Apabila Notaris Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagai Penyimpan Surat Wasiat	67
C. Upaya Yang Dapat Ditenpuh Oleh Para Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Notaris Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagai Penyimpan Surat Wasiat	71
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran - saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN - LAMPIRAN	79

KATA PENGANTAR

Kepada Allah SWT, penulis menghaturkan puja puji yang sekhidmat-khidmatnya disebabkan karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **KAJIAN TERHADAP PERAN NOTARIS SEBAGAI PENYIMPAN SURAT WASIAT DI KABUPATEN SEMARANG** untuk dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis juga dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan karya ilmiah ini..
5. Bapak Budi Ispriyarso, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Ibu Ny. Kustiana Haryoto, SH, Ibu Yuli S. Facruddin, SH, Ibu Titi Herwati Soeryabrata, SH. MHum, Ibu Medania Aristantini, SH dan Ibu Anief

Ratnawati, SH selaku Notaris responden yang telah meluangkan waktu kepada penulis.

7. Bapak / Ibu Dosen Penguji tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada karya ilmiah ini.
8. Seluruh staf Pengajar dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Seluruh keluargaku tersayang yang telah memberikan dukungan, fasilitas dan doa-doanya selama mengikuti pendidikan.
10. Seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan angkatan 2003,
11. Dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan dan Penulis berharap agar kepada Penulis diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dilanjutkan oleh penelitian lainnya.

Semarang, 26 Agustus 2005

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 26 Agustus 2005

Penulis

ABSTRAK

KAJIAN TERHADAP PERAN NOTARIS SEBAGAI PENYIMPAN SURAT WASIAT DI KABUPATEN SEMARANG

Wasiat merupakan akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah pewasiat meninggal dunia khususnya mengenai harta kekayaan milik pewasiat, yang agar dapat berlaku sebagai akta otentik wasiat bersangkutan wajib disimpan oleh pejabat umum yang dalam hal ini adalah Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang menyimpan wasiat, agar wasiat bersangkutan berlaku sebagai akta otentik, wajib menyimpan surat wasiat berdasarkan ketentuan undang-undang yakni berdasarkan KUH Perdata disesuaikan dengan jenis wasiat yang disimpan. Dimana apabila Notaris melalaikan kewajibannya berdasarkan KUH Perdata mengakibatkan wasiat tidak dapat berlaku sebagai akta otentik.

Apabila wasiat tidak berlaku sebagai akta otentik, maka ahli waris merupakan pihak yang dirugikan sehingga perlu diketahui bagaimanakah pelaksanaan peran Notaris sebagai penyimpan wasiat, akibat hukum dan upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris bila Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang surat wasiat berdasarkan KUH Perdata, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

Dari penelitian disimpulkan bahwa peran notaris sebagai penyimpan surat wasiat agar berlaku sebagai akta wasiat adalah untuk memeriksa dan memastikan bahwa dalam setiap tahap surat wasiat dari tahap pembuatan, penerimaan dan penyimpanan surat wasiat sudah memenuhi syarat yang ditentukan KUH Perdata, yang menimbulkan akibat hukum terhadap keautentikan akta apabila notaris tidak memenuhi kewajibannya sehingga ahli waris yang dirugikan dapat melaporkan kepada organisasi organisasi notaris atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ungaran.

Kata Kunci : Notaris, Surat Wasiat.

ABSTRACT

INVESTIGATION ON NOTARY ROLE AS A KEEPER OF THE TESTAMENT IN SEMARANG DISTRICT

Testament is a notarial document (official document) that contains a person's statement about his wishes in the future after this person passed away, especially about the wealth of the person. This is use as an authentic notarial document of a person testament which is keeper or store by the general functionary, in this termis Notary Public.

Notary Public is a general functionary who have authority to keep the testament in order to make the testament of the person to become an authentic notarial document. Notary Public must keep the testament letters based on laws determination, which is on Code of Civil Law in agree with the kinds of testament that is stored. In condition, if the notary Public neglecting his duty based on Code of Civil Law, makes the testament invalid as an authentic notarial document.

When the testament letters invalid to be authentic notarial document, the heirs became the detriment side. It requires to find the realization of Notary roles as keeper of testament, in concequences of law and the effort that the heirs will do if the Notary Public do not implements his obligation as a keeper of testament letters.

This research using method of judicial of empirical. Judicial research is used to analyze various regulations about testament letter based on Code of Civil Law, where as empirical approachment is used to analyze about law from the society attitude that formed in community, that always interacted and connected with social aspect.

From the research can be conclude that the Notary Public role as keeper of testament letter to be notarial document is to investigate and ascertain that every step of testamentary letter, from making, accepting and keeping has comply with the requirements from the Code of Civil Law. This could occur law consequences to the authentic notarial document if the Notary Public not fullfill his obligation. And the heirs of lost financial can report this case to the notarial organizations or claim at the General Court in Ungaran.

Key Words : Notary Public, Testament.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dideklarasikan Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, *Declaration of Human Rights* mendapat sambutan di seluruh dunia yang mengakibatkan timbul gerakan-gerakan yang menolak tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia di segala bidang.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia, selanjutnya diadopsi dalam undang-undang dasar masing-masing negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia.

Sebelum dideklarasikannya *Declaration of Human Rights*, melalui Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah terlebih dahulu mendeklarasikan dukungan Indonesia terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi manusia, melalui pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perkembangannya, pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan menyesuaikan pada perkembangan dunia internasional, yang menuntut Indonesia melakukan perubahan dan penyesuaian dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28 F ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menyatakan :

- (1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹

Perlindungan diri pribadi, keluarga dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan masing-masing warga negara, diwujudkan melalui pengaturan undang-undang di bidang harta kekayaan baik pada saat seseorang warga masih hidup hingga yang bersangkutan meninggal dunia.

Di Indonesia, hukum positif yang mengatur tentang perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia, adalah hukum waris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diartikan sebagai :²

Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang : yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Hukum waris, selain mengatur hukum mengenai peralihan harta kekayaan karena wafatnya seseorang berdasarkan undang-undang (*Ab Testamento*), ada pula bagian yang mengatur tentang cara berpindahnya harta seseorang atas kehendaknya sendiri melalui surat wasiat (*Ad Testamento*).

Berpindahnya harta kekayaan karena wasiat (*Ad Testamento*), tidak dapat terjadi begitu saja demi undang-undang, namun diperlukan suatu formalitas

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 55.

² A. Pitlo alih bahasa oleh M. Isa Arief, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 1.

tertentu yang ditentukan undang-undang - dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - agar surat wasiat berlaku sebagai akta otentik, baik bagi pihak yang membuatnya maupun bagi ahli waris dan pihak ketiga.

Ada beberapa lembaga menurut undang-undang yang berperan terhadap keabsahan suatu surat wasiat yaitu : Notaris, Balai Harta Peninggalan dan Pemerintah, dalam hal ini Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Di antara ketiga lembaga tersebut, Notaris sebagai pejabat umum memegang peranan penting, karena Notarislah yang langsung berhadapan dengan para pihak serta merupakan pihak yang diwajibkan undang-undang untuk menyimpan surat wasiat, baik yang dibuat dihadapannya maupun yang dimohonkan untuk disimpan olehnya oleh Pewaris, dengan formalitas tertentu yang apabila tidak dipenuhi oleh Notaris dapat menyebabkan surat wasiat menjadi batal (*nietigheid*) dan berlaku sebagai surat wasiat biasa yang disimpan oleh Pewaris (*codicil*).

Akibat surat wasiat (*testament*) tidak dapat berlaku sebagai akta otentik sangat merugikan para ahli waris karena akan mengakibatkan batalnya seluruh proses pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, sedangkan formalitas yang seharusnya dilakukan oleh Notaris pada saat Pewaris masih hidup sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan, karena Pewaris sudah meninggal dunia.

Mengingat pentingnya bagi Notaris untuk memenuhi seluruh formalitas yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar suatu surat wasiat

dapat berlaku sebagai akta otentik, maka penulis berkeinginan untuk menulis tesis dengan judul : **KAJIAN TERHADAP PERAN NOTARIS SEBAGAI PENYIMPAN SURAT WASIAT DI KABUPATEN SEMARANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah peran Notaris sebagai penyimpan surat wasiat, agar suatu surat wasiat berlaku sebagai akta otentik ?
2. Apakah akibat hukum apabila Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat ?
3. Upaya apakah yang dapat ditempuh oleh para ahli waris yang dirugikan, akibat Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Notaris sebagai penyimpan surat wasiat agar surat wasiat berlaku sebagai akta otentik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum apabila Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat ditempuh oleh para ahli waris yang dirugikan, akibat Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri yang menyangkut proses penyimpanan surat wasiat oleh Notaris.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang akibat hukum, apabila Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang Notaris, Surat Wasiat dan Notaris Sebagai Penyimpan Surat Wasiat.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Peran Notaris Sebagai Penyimpan Surat Wasiat Agar Surat Wasiat Berlaku Sebagai Akta Otentik, Akibat Hukum Apabila Notaris Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagai Penyimpan Surat Wasiat dan Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Para Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Notaris Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagai Penyimpan Surat Wasiat.

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah :

"Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

2. Dasar Hukum

Mengenai Notaris sebagai pejabat yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a). Warga Negara Indonesia ;
- b). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c). Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- d). Sehat jasmani dan rohani ;
- e). Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan ;
- f). Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan
- g). Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan

- Kewenangan

Kewenangan Notaris diatur Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- (1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2). Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- b. membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
- g. membuat akta risalah lelang.

(3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Kewajiban

Kewajiban Notaris diatur Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

(1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris ;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta ;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya ;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain ;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku ;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga ;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan ;

- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya ;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan ;
 - k. mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan ;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris ;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2). Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3). Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun ;
 - b. penawaran pembayaran tunai ;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga ;

- d. akta kuasa ;
 - e. keterangan kepemilikan ; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4). Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat rangkap lebih dari 1 (satu), ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata. "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5). Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6). Bentuk dan ukuran cap / stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7). Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8). Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

- Larangan

Larangan terhadap Notaris diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya ;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri ;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara ;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat ;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta ;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris ;
- h. menjadi Notaris Pengganti ; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

5. Pemberhentian

- Diberhentikan sementara dari jabatan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena :

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang ;

- b. berada di bawah pengampuan ;
- c. melakukan perbuatan tercela ; atau
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

- Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- c. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

"Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

B. Surat Wasiat

1. Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur masalah wasiat dalam Pasal 874 s/d 953.

2. Pengertian

Pengertian 'surat wasiat' atau testamen disebutkan dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

"Suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali".

Berdasarkan ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka dapat disebut 'surat wasiat' atau 'testamen' apabila memenuhi unsur-unsur : ¹

- a) suatu surat (akta) yang merupakan sepihak.
- b) berisi pernyataan tentang apa yang dikehendaki oleh si pembuat akan terjadi setelah ia meninggal dunia.
- c) surat itu dapat dicabut kembali.

¹ Liliana Tedjosaputro, Hukum Waris Menurut Surat Wasiat (Ad Testamento), Agung Press, Semarang, 1991, hlm. 3.

3. Syarat-syarat Bagi Pembuat Wasiat

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagi pembuat wasiat disyaratkan hal-hal sebagai berikut : ²

1). Pasal 895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seseorang harus mempunyai budi akalnya".

Jadi pembuat surat wasiat pada saat membuat surat wasiat, tidak sedang dalam keadaan sakit ingatan atau sakit berat yang mengakibatkan ia tidak dapat berfikir teratur.

2). Pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, tak diperbolehkan membuat surat wasiat".

Jadi pembuat surat wasiat harus sudah genap berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah sebelum usia 18 tahun.

3). Pasal 898 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Kecakapan seorang yang mewariskan, harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada, tatkala surat wasiat dibuatnya"

Jadi cakap membuat surat wasiat ditentukan berdasarkan keadaan pada saat wasiat dibuat, bukan pada saat si pembuat surat wasiat meninggal dunia.

4. Syarat-syarat Bagi penerima Wasiat

Syarat yang harus dipenuhi bagi penerima wasiat : ³

² Ibid., hlm. 3 - 7.

³ Ibid., hlm. 18 - 20.

- 1). Orang yang diberi keuntungan harus sudah ada pada saat si Pewasiat meninggal dunia dengan mengingat Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia".

- 2). Penerima keuntungan tersebut bukan merupakan orang-orang yang tidak cakap untuk mewaris (*on bekwaam*).

Menurut Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud 'tidak cakap' adalah :

- (1). Mereka yang dihukum karena membunuh Pewaris ;
- (2). Mereka yang menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiat.
- (3). Mereka yang dengan paksaan dan kekerasan telah mencegah Pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.
- (4). Orangtua, istri, suami, anak-anak dari orang yang termasuk dalam kategori (1) - (3) diatas.

5. Pembedaan Surat Wasiat

- 1). Wasiat ditinjau dari sudut 'isinya' dibedakan menjadi : ⁴

⁴ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teori dan Praktek), Tarsito, Bandung, 1988, hlm. 42.

a). Wasiat Pengangkatan Waris (*Testamentair Erfrecht*)

Adalah suatu wasiat dimana orang yang mewasiatkan itu didalam wasiatnya mengangkat seseorang atau beberapa orang itu menjadi ahli warisnya terhadap seluruh atau sebagian harta peninggalannya, setelah ia meninggal dunia.

b). Wasiat Yang Berisi Hibah (Hibah Wasiat / *Legaat*)

Adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, di mana orang yang mewasiatkan itu memberikan beberapa barangnya dari satu jenis tertentu, kepada seseorang atau lebih.

2). Wasiat ditinjau dari sudut 'bentuknya' dibedakan menjadi : ⁵

a). Wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*)

Yang dimaksud dengan wasiat ini adalah wasiat yang harus ditulis dengan tangan sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat. Selanjutnya wasiat itu diserahkan sendiri kepada Notaris untuk disimpan.

Wasiat olographis sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh orang yang membuatnya (Pasal 934 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b). Wasiat Umum (*Openbaar Testament*)

Berdasarkan Pasal 933 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud wasiat umum adalah :

⁵ *Ibid.*, hlm. 44 - 47.

"Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi".

Dengan demikian, suatu wasiat menjadi wasiat umum apabila pihak yang ingin membuat wasiat datang menghadap Notaris dan menyatakan kehendaknya dan selanjutnya Notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut.

c). Wasiat Rahasia (Testamen Rahasia)

Yang dimaksud dengan wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat, tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Selanjutnya wasiat rahasia harus diserahkan dalam keadaan tertutup dan disegel dan diserahkan pada Notaris dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi (Pasal 940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selain ketiga bentuk surat wasiat tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal bentuk lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 935 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat wasiat berdasarkan Pasal 935 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan nama "*Olografil Codicil*" atau "*Codicil*" yaitu suatu bentuk surat wasiat yang cukup dibuat dalam bentuk dibawah tangan dan tanpa suatu formalitas tertentu.

Codicil harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris sendiri dan harus diberi tanggal.

Menurut Pasal 935 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Codicil* hanya boleh memuat tentang :

- pengangkatan pelaksana wasiat.
- penyelenggaraan penguburan.
- penghibahan pakaian, perhiasan dan mebel-mebel tertentu.

6. Saksi

Untuk menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 944 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

- 1). Saksi harus telah berumur 21 tahun atau telah kawin ;
- 2). Saksi harus penduduk Indonesia ;
- 3). Saksi harus mengerti Bahasa Indonesia atau bahasa yang dipergunakan dalam surat wasiat.

Sedangkan orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi dalam pembuatan suatu wasiat adalah :

- 1). Semua ahli waris atau legataris ;
- 2). Semua keluarga sedarah atau keluarga berdasarkan perkawinan sampai derajat keenam ;
- 3). Anak-anak atau cucu dari keluarga tersebut sampai derajat keenam ;
- 4). Pembantu rumah tangga dari Notaris, pada waktu membuat surat wasiat.

7. Syarat-syarat Wasiat ⁶

Suatu wasiat agar dapat berlaku secara sah, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat tersebut terdiri dari syarat formil dan syarat materiil.

1). Syarat Formil

Syarat formil meliputi 2 hal, yaitu yang berkenaan dengan subyek dan yang berkenaan dengan obyek dari suatu wasiat.

a). Syarat yang berkenaan dengan subyek

Syarat yang berkenaan dengan subyek suatu wasiat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- Pasal 985 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur tentang syarat bagi orang yang akan membuat wasiat. Menurut ketentuan pasal ini, seseorang yang akan membuat wasiat harus memenuhi syarat-syarat :

- sehat akal budinya (tidak terganggu ingatannya atau gila) ;
- tidak berada dibawah pengampuan

kecuali orang yang diletakkan dibawah pengampuan karena pailit.

⁶ Benyamin Asri, *op. cit.*, hlm. 48 - 52.

- Pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur batas minimum bagi orang yang akan membuat wasiat. Menurut ketentuan pasal ini, orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun.

- Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh 2 (dua) orang untuk keuntungan satu sama lain atau untuk menguntungkan pihak ketiga.

b). Syarat yang berkenaan dengan obyek

Syarat yang berkenaan dengan suatu obyek wasiat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal-pasal tersebut :

- Pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur tentang pelaksanaan suatu wasiat. Menurut ketentuan pasal ini, syarat-syarat yang ada dalam suatu wasiat harus dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan kesusilaan.

- Pasal 890 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur tentang sebab yang palsu yang terdapat didalam suatu wasiat. Menurut pasal ini, penyebutan sesuatu sebab yang palsu, harus dianggap tidak tertulis, kecuali apabila sebab yang palsu itu akan merubah pendirian Pewaris jika

Pewaris mengetahui kepalsuan itu sebelumnya. Wasiat demikian dianggap batal.

- Pasal 893 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur suatu wasiat yang dibuat karena paksaan. Menurut ketentuan pasal ini, segala wasiat yang dibuat sebagai akibat dari paksaan, tipu atau muslihat adalah batal.

2). Syarat Materiil

Syarat-syarat materiil yang dimaksudkan disini adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan isi dari suatu wasiat. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

- Pasal 879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur tentang *Fidei Commis*, yaitu pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan. Hal ini dilarang.

- Pasal 885 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut ketentuan pasal ini, jika kata-kata dari suatu wasiat itu jelas, maka surat wasiat yang demikian tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari kata-kata yang terdapat didalam surat wasiat itu.

- Pasal 994 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur larangan bagi anak yang belum dewasa walau telah berumur 18 tahun untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali, melainkan setelah wali

tersebut mengadakan perhitungan tanggung jawabnya atas perwaliannya.

Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, adalah wasiat untuk kepentingan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih menjadi wali atau bekas walinya.

- Pasal 905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur larangan terhadap anak belum dewasa menghibah wasiatkan sesuatu kepada pengajar mereka, kepada guru yang tinggal serumah dengan mereka, kecuali guna membalas jasa dengan memperhatikan jasa-jasa yang telah diperbuat dan terhadap harta kekayaan si penghibah.

- Pasal 906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur larangan untuk menghibah wasiatkan sesuatu kepada tabib atau dokter yang telah melayani seseorang sewaktu ia menderita sakit sampai akhir hidupnya.

Pengecualian dari ketentuan pasal ini adalah :

- segala ketetapan dalam bentuk hibah wasiat, guna membalas jasa-jasa yang telah diberikan ;
- segala ketetapan untuk kepentingan suami atau isteri dari orang yang mewariskan ;
- segala ketetapan untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai dengan derajat keempat seandainya orang yang mewariskan tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus.

- Pasal 907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur tentang larangan bagi Notaris yang dengan perantaraannya telah dibuat akta wasiat dan para saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta wasiat, tidak diperbolehkan menikmati / mengambil keuntungan sedikitpun dari penetapan wasiat itu.

- Pasal 911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut ketentuan pasal ini, suatu penetapan waris yang diambil guna keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris adalah batal, sekalipun penetapan itu diambilnya dengan nama seorang perantara.

- Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini memberikan larangan kepada orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan dari surat wasiat, yaitu :

- a). mereka yang telah dihukum karena membunuh orang yang mewariskan ;
- b). mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiatnya ;
- c). mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah orang yang mewariskan untuk merubah, mencabut surat wasiat, sekalipun dilakukan oleh isteri atau suami dan anak-anak mereka.

8. Pencabutan Surat Wasiat

Wasiat merupakan perbuatan sepihak, sehingga si pembuat wasiat mempunyai kebebasan untuk mencabut kembali suatu wasiat yang pernah dibuatnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu wasiat dapat dicabut dengan cara :

1). Pencabutan secara tegas

Pencabutan secara tegas dilakukan dengan cara membuat wasiat yang baru dimana diterangkan secara tegas bahwa wasiat yang terdahulu ditarik kembali atau dicabut atau dapat pula penarikan atau pencabutan itu dilakukan dengan akta Notaris khusus (Pasal 992 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2). Pencabutan secara diam-diam

Pencabutan secara diam-diam dapat dilakukan dengan membuat wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan wasiat yang lama (Pasal 994 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

8. Gugurnya Surat Wasiat ⁷

Suatu wasiat gugur berarti dalam hal ini tidak ada tindakan aktif dari orang yang membuat wasiat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal-hal yang dapat mengakibatkan gugurnya suatu wasiat adalah :

⁷ Ibid., hlm. 53 - 55.

- Pasal 977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut ketentuan pasal ini, apabila suatu wasiat memuat suatu ketetapan yang bergantung pada peristiwa yang tidak tertentu, maka jika penerima wasiat atau legaat itu meninggal dunia sebelum peristiwa itu terjadi, wasiat itu menjadi gugur demi hukum.

- Pasal 998 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut ketentuan pasal ini, jika orang yang mewasiatkan hanya bermaksud mempertanggungkan pelaksanaan ketetapan, maka syarat yang demikian tidaklah menjadi rintangan bagi si penerima wasiat untuk menyerahkan kepada ahli warisnya suatu hak yang telah diperolehnya.

- Pasal 999 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut ketentuan pasal ini, tiap-tiap hibah wasiat gugur, apabila barang yang dihibahkan musnah pada saat pemberi hibah masih hidup. Selain dari pada itu, wasiat juga gugur apabila barang yang diwasiatkan itu musnah ketika barang itu masih berada ditangan si pemberi wasiat dan musnahnya barang itu baik karena kesalahan maupun bukan karena kesalahan si penerima hibah atau karena orang lain yang harus menyerahkan barang itu.

- Pasal 1000 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan pasal ini, tiap hibah wasiat yang mengenai bunga, piutang atau tuntutan utang lainnya kepada orang ketiga, gugur apabila telah dibayar kepada pemberi wasiat pada masa hidupnya.

- Pasal 1001 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini mengatur bahwa setiap wasiat menjadi gugur apabila orang yang diberi wasiat menolak menerima hibah atau warisan atau jika mereka ternyata tidak cakap untuk menerimanya.

- Pasal 1004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Suatu wasiat dapat dituntut supaya gugur, apabila syarat-syarat yang terdapat di dalam wasiat tersebut tidak dilaksanakan.

C. Notaris Sebagai Penyimpan Surat Wasiat

a. Dasar Hukum

- Wasiat Olographis

Wasiat olographis wajib disimpan oleh Notaris. Hal mana disebutkan dalam Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Wasiat Umum

Wasiat umum dibuat dihadapan Notaris (Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan selanjutnya disimpan dalam Protokol Notaris sebagaimana akta-akta umum lainnya.

- Wasiat Rahasia

Wasiat rahasia diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup dan disegel dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi (Pasal 940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Prosedur Penyimpanan Surat Wasiat Oleh Notaris⁸

1). Wasiat Olographis

Wasiat olographis harus disampaikan Pewaris kepada dan untuk disimpan oleh seorang Notaris.

Notaris yang menerima wasiat olographis selanjutnya membuat "Akta Penyimpanan" (*Acte van Depot*) yang ditanda tangani oleh :

- a). Pewaris ;
- b). Notaris ;
- c). 2 orang saksi.

Akta Penyimpanan (*Acte van depot*) harus ditulis :

- a). di bawah surat wasiat itu sendiri jika surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka.
- b). pada kertas tersendiri, jika surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup (dimasukkan dalam sampul), dan pewaris dihadapan Notaris dan para saksi harus membubuhkan catatan pada sampul yang berisi wasiat tersebut, yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya serta catatan mana dikuatkan dengan tanda tangannya.

Apabila pewaris setelah menanda tangani surat wasiat atau sampulnya tidak dapat menanda tangani sampul atau akta penyimpanan atau kedua-duanya disebabkan karena adanya halangan yang timbul

⁸ Liliana Tedjasaputro, *op. cit.*, hlm. 13 - 15.

sesudahnya maka hal berhalangannya Pewaris tersebut harus dinyatakan dalam Akta Penyimpanan.

Dalam hal wasiat olographis dicabut sewaktu-waktu oleh Pewaris, maka Notaris membuat suatu akta otentik mengenai hal tersebut.

2). Wasiat Umum

Wasiat umum dibuat dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pewaris menerangkan kepada Notaris (diluar hadirnya para saksi) mengenai apa yang ia kehendaki.

Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak Pewaris dalam pokok-pokok saja.

Apabila keterangan Pewaris yang diutarakan kepada Notaris di luar hadirnya para saksi sudah dituangkan dalam surat / akta yang dibuat oleh Notaris, maka Pewaris sekali lagi harus mengutarakan kehendaknya tersebut dihadapan para saksi.

Konsep surat wasiat dibacakan oleh Notaris dihadapan para saksi dan setelah itu Pewaris harus ditanya oleh Notaris, apakah apa yang dibacakan itu telah benar-benar wasiat seperti yang dimaksudkan oleh Pewaris.

Bila sudah benar, maka surat wasiat harus ditanda tangani oleh Pewaris, Notaris dan para saksi. Sedangkan bila Pewaris berhalangan untuk menanda tangani surat wasiat atau tidak dapat membubuhkan tanda

tangannya, maka keterangan tentang hal tersebut serta sebab-sebabnya harus disebut dalam surat wasiat.

Di dalam surat wasiat harus disebutkan pula bahwa seluruh ketentuan-ketentuan tata tertib acara sudah dipenuhi dengan sempurna.

3). Wasiat Rahasia

Pasal 940 dan 941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang wasiat rahasia.

Wasiat rahasia harus ditulis sendiri oleh Pewaris atau oleh orang lain atas nama Pewaris dan Pewaris harus menanda tangani testamen tersebut.

Kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan tersebut harus ditutup dan disegel dan diserahkan pada Notaris untuk disimpan menjadi di antara protokolnya dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

Pewaris harus menerangkan pada Notaris dan para saksi bahwa kertas atau sampul yang diserahkan kepada Notaris itu berisi wasiatnya yang ditulis sendiri atau dituliskan oleh orang lain untuk Pewaris dan ia telah membubuhkan tanda tangannya.

Notaris atas penerimaan tersebut harus membuat "Akta Pengalamatan" (*Acte van Superscriptie*) yang ditulis pada surat wasiat atau sampulnya dan harus ditanda tangani oleh :

- Pewaris
- Notaris

- 4 (empat) orang saksi.

Bila Pewaris setelah menanda tangani surat wasiat tidak dapat menanda tangani Akta Pengalamatan, maka hal berhalangannya Pewaris tersebut harus dinyatakan dalam Akta Pengalamatan.

2. Kewajiban Notaris

1). Terhadap Surat Wasiat Yang Dibuat dan Disimpan

Kewajiban Notaris terhadap akta / surat wasiat yang dibuat atau disimpannya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, i dan j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut :

- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan ;
- i. mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya ;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan ;

2). Bila Pewaris meninggal dunia

- Membawa surat wasiat ke Balai Harta Peninggalan untuk dibuka

Bila Pewasiat meninggal dunia, maka Notaris membawa surat wasiat dalam keadaan tertutup ke Balai Harta Peninggalan untuk dibuka.

Balai Harta Peninggalan membuka surat wasiat dengan membuat akta yang disebut proses verbal akta dengan menyebutkan keadaan isi surat wasiat tersebut.

Setelah wasiat dibuka dengan dibuat proses verbal akta, Balai Harta Peninggalan menyerahkan kembali kepada Notaris yang menyimpannya.

- Memberitahu kepada semua yang berkepentingan tentang adanya suatu wasiat

Pasal 943 menentukan bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, Notaris harus memberitahukan kepada semua yang berkepentingan bahwa di antara akta sahnya (minuta) ada wasiat dari yang meninggal dunia.

Jangka waktu untuk memberitahukan ditetapkan oleh undang-undang terhitung 40 (empat puluh) hari sejak tanggal Notaris mengetahui tentang hal meninggalnya Pewasiat.

Adapun yang dimaksud dengan 'pihak yang berkepentingan' adalah mereka yang memperoleh keuntungan dari wasiat tersebut.

3. Akibat Hukum Bila Notaris Melalaikan Kewajibannya Sebagai Penyimpan Surat Wasiat

Surat wasiat yang tidak memenuhi syarat formalitas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak berlaku sebagai wasiat (Pasal 1000 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Ketentuan ini menurut beberapa sarjana dianggap terlalu kaku ⁹ sehingga berkembang aliran yang berpendapat agar dibedakan antara pelanggaran terhadap peraturan formalitas yang penting yang dapat mengakibatkan "kebatalan" / *nietigheid* dengan pelanggaran yang kurang penting yang tidak mengakibatkan kebatalan.

Selain dari pada itu, ada pula pendapat berdasarkan Pasal 1931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana surat wasiat yang batal dapat disahkan oleh ahli waris Pewaris. ¹⁰

⁹ Ali Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22.

¹⁰ A. Pitlo, op cit., hlm. 195.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini digunakan penelitian yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang surat wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.² Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatik mengenai surat wasiat. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang kewajiban Notaris sebagai penyimpan surat wasiat. Lebih jauh penelitian ini berusaha sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generasilisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek / subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.⁴

² Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

³ Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001, hlm. 57.

⁴ Ibid.

Populasi dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan penyimpanan surat wasiat oleh Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Semarang yang terdiri dari : Notaris, Pengadilan Negeri Ungaran, Pewasiat dan ahli warisnya dan BHP.

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Notaris yang sudah berpraktek selama lebih dari 5 (lima) tahun di Kabupaten Semarang sebanyak 5 (lima) orang.
2. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran.
3. Balai Harta Peninggalan.
4. Pewasiat dan Ahli Waris.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵

⁵ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 12.

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa : norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.⁶

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 3. Yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 1. Hukum, buku yang membahas surat wasiat.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 52 - 53.

2. Buku-buku yang membahas peran Notaris sebagai penyimpan surat wasiat.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.⁷

⁷ S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1992, hlm. 9.

5. Pengolahan dan Analisis Data

5.1. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut : ⁸

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan ;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya kemudian mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

5.2. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

⁸ Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 45.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹

Pengertian di analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif - induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

¹⁰ H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988, hlm. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Sebagai Penyimpan Surat Wasiat Agar Surat Wasiat Berlaku Sebagai Akta Otentik

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang untuk : membuat akta otentik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menjelaskan apa yang disebut dengan 'akta otentik', namun hanya menyebutkan tentang pengertian 'akta Notaris', yang berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan sebagai :

“Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak disebutkan jenis-jenis akta yang dapat dibuat oleh Notaris. Namun apabila dihubungkan dengan Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimuat dalam Pasal 86 yang menyatakan bahwa :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.

mengakibatkan seluruh ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan Notaris termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) masih tetap berlaku

dan mengikat Notaris dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik di Indonesia.

Salah satu bentuk akta otentik yang wajib dibuat oleh Notaris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah Surat Wasiat.

Selain dibuat oleh Notaris, pembuat Surat Wasiatpun diwajibkan memenuhi syarat-syarat tertentu agar Surat Wasiat yang dibuatnya berlaku sebagai akta otentik.

Adapun yang wajib dipenuhi oleh seseorang agar dapat membuat surat wasiat adalah :

a. Berakal Sehat

Menurut Pasal 895 KUH Perdata, agar dapat membuat atau mencabut suatu wasiat, seseorang harus berakal sehat / waras.

Tentang pengertian 'akal sehat', tidak dijelaskan dalam KUH Perdata. Para sarjana Diephuis, Land, Meijers dan Neegens berpendapat bahwa :

... selain daripada orang gila (*krankzinnige*), juga mereka yang kehilangan akal sehat, seperti sangat mabuk atau demam berat harus dianggap tidak cakap pula ¹

Seorang pembuat surat wasiat sedang dalam keadaan waras atau (agak) terganggu akal sehatnya, harus dibuktikan oleh mereka yang menyangkal tentang ketidak sahan suatu wasiat. Notaris dalam hal ini tidak berwenang (*niet bevoegd*) untuk menentukan masalah ini. ²

¹ Komar Andasmita, Notaris III – Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUH Perdata (Teori dan Praktek), INI Komda Jawa Barat, Bandung, 1987, hlm. 285.

² Ibid.

Dalam hal ini, seorang notaris sebelum membuat suatu wasiat, wajib berhati-hati apabila datang seorang yang meminta dibuatkan surat wasiat. Prinsip kehati-hatian ini dapat diterapkan seorang notaris dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- meneliti tingkah laku penghadap ;
- mengajak penghadap berbicara, jika dapat mengarahkan penghadap berbicara masalah wasiat yang akan dibuat. ³

Berdasarkan pengamatan notaris dari jawaban yang diberikan penghadap, notaris dapat menilai apakah penghadap berakal sehat atau tidak.

Upaya lainnya untuk mengetahui apakah penghadap yang minta dibuatkan surat wasiat berakal sehat atau tidak menurut Yulli S. Fachrudiin, SH adalah dengan membicarakan tentang wasiat yang akan dibuat oleh penghadap. Karena orang yang kurang akalnya tidak akan mampu berbicara tentang harta kekayaan dan keluarganya. ⁴

Selain cara-cara tersebut, notaris dapat pula meminta bukti-bukti jati diri penghadap dan keluarga serta mencoba bertanya tentang lingkungan penghadap yang kira-kira diketahui pula oleh notaris. ⁵

³ Wawancara dengan Kustiana Haryoto, SH, Notaris / PPAT di Ungaran tanggal 25 Juni 2005.

⁴ Wawancara dengan Yulli S. Fachruddin, SH, Notaris / PPAT di Ungaran tanggal 28 Juni 2005.

⁵ Wawancara dengan Titi Herawati, SH. MHum. MHum Notaris / PPAT di Ungaran tanggal 25 Juni 2005.

Apabila notaris berdasarkan upaya-upaya tersebut mendapat keyakinan bahwa penghadap berakal sehat, maka notaris dapat memeriksa syarat-syarat lainnya agar surat wasiat yang dikehendaki oleh penghadap dapat dibuat oleh notaris.

Bila notaris diminta untuk menyimpan surat wasiat yang sudah dibuat oleh penghadap, maka menurut Anief Ratnawati, SH, seorang notaris dalam keadaan demikian setidaknya menanyakan segala sesuatu secara lengkap pada penghadap tentang surat wasiat tersebut. Apabila berdasarkan tanya jawab tersebut notaris memperoleh keyakinan bahwa penghadap cukup akalnya, maka notaris dapat menerima surat wasiat tersebut, namun apabila tidak, sebaiknya notaris menolaknya.⁶

Pernyataan senada disampaikan pula oleh Medania Aristantini, SH, karena menurutnya lebih baik menolak menyimpan surat wasiat yang tidak jelas waras atau tidaknya pembuat surat wasiat dari pada menimbulkan masalah di kemudian hari.⁷

b. Umur

Menurut ketentuan Pasal 897 KUH Perdata, untuk dapat membuat wasiat, disyaratkan sudah dewasa (18 tahun) atau sudah kawin.

⁶ Wawancara dengan Anief Ratnawati, SH, Notaris / PPAT di Ungaran tanggal 28 Juni 2005.

⁷ Wawancara dengan Medania Aristantini, SH, Notaris / PPAT di Ungaran tanggal 27 Juni 2005.

Untuk memperoleh kepastian mengenai hal tersebut, para notaris responden menyatakan cukup dengan melihat dan menyesuaikan dengan bukti diri penghadap berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan keadaan penghadap.⁸

Dalam praktek, menurut Kustiana Haryoto, SH, jarang bahkan ia belum pernah menemui calon pembuat surat wasiat yang masih di bawah umur. Umumnya penghadap calon pembuat surat wasiat sudah tua.⁹

c. Syarat-syarat Wasiat Yang Sah

Pasal 890 dan 891 KUH Perdata menyebutkan tentang alasan (isi) sesuatu wasiat. Menurut Komar Andasasmita diartikan sebagai berikut :

- Apabila dalam wasiat terdapat sesuatu alasan (alas sebab) yang palsu (*valse beweegredenen*), maka alasan yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Namun jika wasiat (kehendak terakhir) itu sendiri menunjukkan bahwa pewaris (*testateur*) tidak akan mengambil ketetapan demikian, bila ia dulu mengetahui tentang kepalsuan alasan tersebut, maka ketetapan (*beschikking*) itu tidak sah (Pasal 890).
Meijers memberikan contoh, bahwa penyesatan tentang orang dapat mengakibatkan kesesatan dalam alas sebab.
- Memang sulit untuk bisa menentukan apakah pewaris (almarhum / almarhumah) telah maklum, ada atau tidaknya penyesatan atau kepalsuan.
- Pasal 891 selanjutnya menegaskan, bahwa apabila dalam wasiat disebut / tercantum suatu alasan, apakah alasan itu sungguh-sungguh palsu, maka baik pengangkatan waris atau penghibahan (*legaat*) itu menjadi batal (*nieteg*), jika alasan yang bersangkutan bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Beberapa orang penulis, seperti Suyling, Dubois dan Petit berpendapat, bahwa “juga tujuan yang tak diperbolehkan dan dirahasiakan (termasuk alas sebab) adalah batal”.
- Eggens menganjurkan agar wasiat itu sebaiknya tidak memuat alasan-alasan (alas sebab) yang tak perlu.¹⁰

⁸ Wawancara dengan notaris-notaris responden tanggal 25, 27 dan 28 Juni 2005 di Ungaran.

⁹ Kustiana Haryoto, SH, Op. cit.

¹⁰ Komar Andasamita, Op. cit., hlm. 283.

Dalam menentukan isi wasiat, pada umumnya notaris tidak mempunyai wewenang untuk turut menentukan. Namun apabila notaris menilai bahwa ada hal-hal yang kurang tepat (dalam bidang hukum), notaris dapat memberikan nasehat hukum kepada penghadap.¹¹

Apabila notaris sudah memberi nasehat hukum dalam hal pembuatan wasiat namun penghadap tetap yakin dan tetap pada pendiriannya, maka notaris akan membuat wasiat sesuai dengan yang dikedaki oleh pembuat wasiat.¹²

Notaris Anief Ratnawati, SH memberikan ilustrasi pengalamannya ketika memberi nasehat pada seorang penghadap yang ingin dibuatkan surat wasiat untuk menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya hanya pada anak kesayangannya saja, di lain pihak ia masih memiliki anak lainnya. Menurut penghadap, ia menghendaki demikian karena ibu sang anak (yang merupakan istri keduanya) telah menyatakan bahwa anak-anak lain dari istri pertama telah menyetujui hal tersebut. Notaris dalam hal ini telah memberikan penjelasan pada penghadap bahwa untuk dapat membuat wasiat demikian dibutuhkan surat persetujuan dari anak-anak yang lainnya – yang tidak mendapat wasiat – jika ingin wasiat dapat dilaksanakan setelah penghadap meninggal dunia – namun penghadap tidak bersedia karena menurutnya anak-anaknya yang lain tidak pernah memberikan perhatian padanya terutama sejak ia menikah lagi.¹³

¹¹ Yulli S. Fachruddin, SH., Op. cit.

¹² Titi Herawati, SH. MHum, Op. cit.

¹³ Anief Ratnawati, SH, Op. cit.

d. Paksaan dan Tipu Muslihat

Menurut ketentuan Pasal 893 KUH Perdata, semua wasiat yang telah dibuat akibat paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) atau muslihat / itikad buruk (*arglist*) adalah batal (*nieteg*).

Bagi seorang notaris adalah sulit untuk mendapatkan kepastian apakah suatu wasiat – baik yang akan dibuat dihadapan notaris, maupun yang telah dibuat sendiri oleh pewaris – adalah didasarkan karena adanya paksaan, penipuan atau itikad buruk.¹⁴

Menurut Kustiana Haryoto, SH, baginya cukup memberikan nasehat hukum bila isi wasiat nantinya melanggar ketentuan *Legitime Portie* ahli waris lainnya. Sedangkan sepanjang isi wasiat tidak melanggar hukum dan kepatutan, maka sebagai notaris, dirinya akan membuat surat wasiat yang diminta buat atau minta disimpan oleh penghadap.¹⁵

Demikian pula pendapat Mediana Aristantini, SH. Menurutnya, notaris tidak berwenang untuk mengetahui lebih jauh tentang apakah seorang penghadap membuat surat wasiat karena ada paksaan, penipuan atau itikad buruk. Karena bila memang ada, masih ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan pembuat surat wasiat yaitu mencabut wasiat yang sudah pernah dibuatnya atau langsung membuat surat wasiat baru tanpa mencabut surat wasiat yang pernah dibuatnya.¹⁶

¹⁴ Medania Aristantini, SH., Op. cit.

¹⁵ Kustiana Haryoto, SH., Op. cit.

¹⁶ Mediana Aristantini, SH., Op. cit.

Menurut Pasal 931 KUH Perdata, dikenal 3 (tiga) jenis wasiat, yaitu wasiat olografis, wasiat umum dan wasiat tertutup (rahasia). Dilain pihak, menurut doktrin, dikenal 2 (dua) macam wasiat yaitu :

- wasiat yang dibuat dengan akta umum (*openbare akte*) dihadapan notaris dan
- wasiat yang dibuat bukan dengan akta umum (*niet openbare akte*) yang dibagi lagi menjadi :
 - wasiat olografis yaitu surat wasiat yang ditulis tangan (*onderhands*) dan di tanda tangani oleh pewaris sendiri, dan
 - wasiat yang dibuat secara rahasia.¹⁷

a. Wasiat Umum

Dalam membuat akta wasiat umum, notaris wajib memperhatikan syarat-syarat umum pembuatan akta dan syarat khusus pembuatan akta wasiat yang menyangkut akal sehat, umur, alasan wasiat yang sah serta tidak ada paksaan dan tipu muslihat.

KUH Perdata mengatur tentang syarat dan formalitas yang harus dipenuhi oleh notaris dalam membuat akta wasiat dalam Pasal 938 dan 939.

- Pasal 938 KUH Perdata

Berdasarkan Pasal 938 KUH Perdata, surat wasiat umum harus diselenggarakan dihadapan notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Hal mana sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Mengenai jumlah saksi lebih dari 2 (dua) orang, menurut Komar Andasmita yang mendasarkan pada pendapat Klaassen, Eggens, Polak, Melis dan Pitlo :

¹⁷ Komar Andasmita, Loc. cit.

wasiat itu tetap sah, karena tidak bertentangan dengan undang-undang, hanya (walaupun) pada akta itu diberikan "kehidmatan" (*solemniteit*) yang lebih (berkelebihan) dibandingkan dengan apa yang disyaratkan dalam undang-undang.¹⁸

Menurut Kustiana Haryoto, SH, jumlah saksi untuk surat wasiat umum cukup 2 (dua) sebagaimana disyaratkan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga tidak perlu menambahkan jumlah saksi, baik yang berasal dari karyawan kantor notaris maupun dari pembuat surat wasiat.¹⁹

Notaris Anief Ratnawati menyetujui bahwa jumlah saksi 2 (dua) orang, namun bila penghadap menghendaki, ia tetap dapat menerima saksi lebih dari 2 (dua) orang bila penghadap menghendaki hal tersebut, yang penting saksi tidak kurang dari 2 (dua) orang.²⁰

Selanjutnya mengenai pembuatan dihadapan notaris, menurut Medania Aristantini, SH tidak berarti penghadap wajib berada dihadapan notaris di kantor notaris atau penghadap yang datang menghadap notaris, namun dapat pula dilaksanakan di rumah atau tempat lain yang dikehendaki penghadap, asalkan dilaksanakan dihadapan notaris. Hal mana dalam praktek tergantung pada kondisi pembuat wasiat. Bila pembuat surat wasiat masih sehat, yang bersangkutan dapat datang menghadap notaris di kantor notaris, namun bila ia sudah tidak sehat lagi, maka atas dasar hubungan yang baik dengan notaris, maka

¹⁸ Ibid., hlm. 351.

¹⁹ Kustiana Haryoto, SH., Op. cit.

²⁰ Anief Ratnawati, SH., Op. cit.

notaris dapat pergi ke tempat pembuat wasiat, terutama bila pembuat wasiat sudah diambang maut.²¹

- Pasal 939 KUH Perdata

Formalitas lainnya yang harus dipenuhi, diatur dalam Pasal 939 KUH Perdata, yang dijelaskan oleh Komar Andasamita sebagai berikut :

Seseorang yang hendak membuat wasiat dalam bentuk akta umum, mula-mula menyatakan kehendaknya itu kepada notaris, dengan kata-kata yang jelas / terang (*zakelijk* dan tindakannya secara "*woordelijk*" atau menurut huruf / kata demi kata).

Pada waktu menyatakan untuk permulaan itu para saksi tidak usah hadir (tidak disyaratkan). Dipihak lain bila pernyataan itu dihadiri oleh para saksi pun boleh.

Cara penyampaian kehendaknya itu pewaris mempunyai kebebasan, boleh secara lisan, namun secara tertulis atau dengan tanda (*tekens*) pun bisa.²²

Dalam menyampaikan kehendak terakhir penghadap pada notaris, Titi Herawati, SH. MHum menghendaki agar penghadap melakukannya seorang diri tanpa hadirnya pihak lain, terutama ahli waris. Hal tersebut untuk menjaga rahasia-rahasia yang akan disampaikan oleh penghadap.²³

Notaris Anief Ratnawati, SH dapat menerima kehadiran saksi selama penghadap menyampaikan keinginan terakhirnya pada notaris, terutama bila bahasa yang digunakan penghadap tidak dimengerti oleh notaris atau penghadap tidak bisa berbicara dan menggunakan isyarat.²⁴

²¹ Medania Aristantini, SH., Op. cit.

²² Komar Andasamita, Op. cit., hlm. 351.

²³ Titi Herawati, SH. MHum. MHum, Op. cit.

²⁴ Anief Ratnawati, SH., Op. cit.

Selama atau setelah penghadap menyatakan kehendak terakhirnya, notaris menyusun konsep yang berisi kehendak terakhir penghadap. Setelah penghadap selesai menyatakan kehendak terakhirnya, konsep yang sudah disusun redaksinya oleh notaris diserahkan pada karyawan notaris yang nantinya akan menjadi saksi dalam surat wasiat yang bersangkutan.

Menurut Yulli S. Fachruddin, SH, konsep surat wasiat dapat diketik oleh karyawan kantor notaris manapun – tidak terbatas pada karyawan yang akan menjadi saksi dalam surat wasiat nantinya – karena seluruh karyawan kantor notaris wajib menjaga rahasia, tentang hal-hal yang terjadi di kantor notaris, sehingga kerahasiaan isi surat wasiat tetap akan terjamin.²⁵

Khusus terhadap pernyataan penghadap yang kurang atau tidak jelas, menurut Medania Aristantini, SH, notaris dapat meminta penghadap untuk menuliskan kehendaknya jika penghadap tidak dapat berbicara dengan jelas sehingga kata-katanya tidak dimengerti oleh notaris dan saksi.²⁶

Sedangkan Kustiana Haryoto, SH menyatakan bahwa apabila pernyataan penghadap tidak dapat dimengerti oleh notaris dan penghadap tidak dapat menulis dan menjelaskan dengan isyarat yang dimengerti notaris, maka sebaiknya disarankan pada penghadap untuk mencari orang yang dapat mengerti dan dapat menuliskan untuk kepentingannya dan selanjutnya diserahkan kepada notaris dalam bentuk tertulis atau notaris dapat menolak membuat akta.²⁷

²⁵ Yulli S. Fachruddin, SH., Op. cit.

²⁶ Medania Aristantini, SH., Op. cit.

²⁷ Kustiana Haryoto, SH., Op. cit.

Setelah konsep oleh notaris selesai diketik karyawan notaris, maka penghadap sekali lagi menjelaskan keinginannya dihadap notaris dan saksi-saksi. Selanjutnya notaris akan membacakan konsep akta yang telah dibuat oleh notaris dan menanyakan pada penghadap apakah yang dibacakan oleh notaris adalah benar-benar mengandung kehendak terakhirnya.

Ketika sedang membacakan akta, notaris dapat melakukan penyempurnaan bahkan mengubah seluruh akta bila penghadap menyatakan bahwa ada kekurangan dalam penyusunan konsep oleh notaris.

Notaris Yulli S. Fachruddin, SH menerima bila perubahan dilakukan terhadap salah ketik dan hal-hal yang kurang prinsip, namun bila dilakukan berulang-ulang karena pendengaran dan daya ingat penghadap yang buruk, maka ia akan menerangkan perlahan-lahan mengenai maksud penghadap yang sudah dikemukakan terdahulu dengan harapan penghadap mengingat kembali dan akta tidak perlu berulang-ulang dikoreksi.²⁸

Hal senada dikemukakan oleh Medania Aristantini, SH, yang tidak mentolerir perubahan konsep lebih dari 3 (tiga) kali karena penghadap lupa dan hal-hal lain dari pihak penghadap dan memakan waktu lebih dari 1 (satu) hari.²⁹

Masalah waktu penandatanganan akta juga dibatasi oleh Notaris Anief Ratnawati, SH guna mencegah pewaris lupa terhadap hal-hal yang sudah

²⁸ Yulli S. Fachruddin, SH., Op. cit.

²⁹ Medania Aristantini, SH., Op. cit.

dinyatakannya dihadapan notaris dan menghindari perubahan konsep akta berulang kali oleh penghadap.³⁰

Setelah penghadap menyetujui bunyi konsep akta, maka wasiat ditanda tangani oleh penghadap, notaris dan para saksi (Pasal 939 ayat 5 KUH Perdata).

Apabila pewaris tidak dapat menanda tangani akta, maka keterangan dan sebab halangan harus dicantumkan dalam akta yang bersangkutan.³¹

Hal yang harus dicantumkan oleh notaris mengenai tidak dapat ditanda tangannya akta wasiat oleh penghadap, menurut Titi Herwati, SH. MHum harus ditulis secara lengkap. Misalnya : karena penghadap mengidap stroke sehingga tidak dapat menggerakkan tangannya.³²

Dilain pihak, Kustiana Haryoto, SH, berpendapat bahwa alasan tidak dapat ditanda tangannya akta oleh penghadap cukup ditulis secara garis besarnya saja. Misalnya : karena penghadap lumpuh tangannya.³³

Syarat lainnya yang wajib disebutkan oleh notaris dalam akta wasiat adalah bahwa semua formalitas (tertib acara) yang disyaratkan oleh undang-undang telah dipenuhi (sebagaimana mestinya).³⁴

Mengenai tertib acara yang wajib dipenuhi oleh notaris, menurut Yulli S. Fachruddin, SH tetap wajib disebutkan pada bagian akhir akta walaupun dalam

³⁰ Anief Ratnawati, SH., Op. cit.

³¹ Komar Andasmita, SH., Op. cit., hlm. 353.

³² Titi Herawati, SH. MHum., Op. cit.

³³ Kustiana Haryoto, SH., Op. cit.

³⁴ Komar Andasmita, SH., Loc. cit.

pembuatan akta wasiat dilaksanakan oleh notaris tidak secara beraturan namun memenuhi seluruh formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.³⁵

Hal tersebut tidak disetujui oleh Anief Ratnawati, SH karena menurutnya kewajiban menyebutkan bahwa prosedur yang ditetapkan undang-undang telah dikehendaki undang-undang secara beraturan dan memenuhi seluruh formalitas yang telah ditentukan oleh undang-undang.³⁶

b. Wasiat Olografis

Pasal 932 ayat (1) mensyaratkan bahwa surat wasiat olografis harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris (*testaeur*) sendiri.

Menurut pendapat Diephuis, Lake, Lund, Veegens dan Pitlo yang disetujui oleh Komar Andasasmita, apabila wasiat olografis ditulis dan ditanda tangani bukan oleh pewaris (pembuat wasiat) sendiri, maka wasiat itu batal demi hukum (*geheel nieteg*).³⁷

Wasiat olografis dapat terjadi dalam 2 bentuk, yaitu terbuka dan tertutup. Adapun bentuk olografis digemari orang karena pewaris menghendaki agar isi kehendak terakhirnya tidak diketahui oleh siapapun sampai ia meninggal dunia, termasuk oleh notaris dan para saksi.³⁸

³⁵ Yuli S. Fachruddin, SH., Op. cit.

³⁶ Anief Rahmawati, SH., Op. cit.

³⁷ Komar Andasasmita, Op. cit., hlm. 346.

³⁸ Ibid.

Bila wasiat diserahkan pada notaris dalam keadaan terbuka, maka notaris dapat dengan mudah memeriksa kesamaan antara contoh tulisan pewaris dengan tulisan pewaris dalam surat wasiat sehingga diketahui kebenaran tulisan dan tanda tangan pewaris, namun tidak demikian halnya bila wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup. Karena dalam hal ini notaris tidak dapat melihat tulisan dan tanda tangan pewaris, apakah benar-benar sama dengan tulisan dan tanda tangan pewaris.

Keadaan demikian disiasati notaris Kustiana Haryoto, SH dengan menerangkan akibat hukum pada pewaris bila wasiat ditulis dan ditanda tangani oleh orang lain.³⁹

Menurut Titi Herawati, SH. MHum, hal tersebut tidak perlu dilakukan oleh notaris, karena didalam akte penyimpanan (*akte van depot*) nantinya akan dimuat pernyataan pewaris bahwa wasiat benar-benar dibuat dan ditanda tangani oleh pewaris.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 932 ayat (3) KUH Perdata, notaris setelah menerima wasiat dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, wajib segera membuat akta penyimpanan (*akta van depot*) yang ditanda tangani oleh notaris, pewaris dan para saksi.

³⁹ Kustiana Haryoto, SH., Op. cit.

⁴⁰ Titi Herawati, SH. MHum, Op. cit.

Para penulis antara lain Punt dan Bertling yang disetujui oleh Komar Andasasmita dapat menerima bila akta penyimpanan wasiat dibuat / ditulis oleh orang lain.⁴¹

Mengenai penulisan / pembuatan akta penyimpanan wasiat olografis oleh orang lain yang bukan notaris dapat diterima oleh seluruh notaris responden bila dibuat oleh karyawan kantor notaris, karena menurut mereka, akta penyimpanan tidak memuat mengenai isi wasiat, selain dari pada itu, rahasia tentang isi wasiat tetap terjamin bila akta penyimpanan dibuat oleh karyawan notaris.⁴²

Namun demikian para notaris responden berbeda pendapat bila akta penyimpanan dibuat oleh pihak lain selain karyawan kantor notaris. Menurut Anief Ratnawati, SH bila akta penyimpanan dibuat oleh orang lain yang bukan karyawan kantor notaris, walaupun tidak dilarang undang-undang, namun mengandung bahaya tentang bocornya rahasia mengenai adanya wasiat oleh pewaris. Tanggung jawab mana dibebankan pada notaris.⁴³

Notaris Medania Aristantini, SH juga tidak membenarkan bila akta penyimpanan dibuat oleh orang lain yang bukan karyawan notaris. Menurutnya, bila saat akta penyimpanan surat wasiat akan dibuat dimana kantor notaris sedang kosong – misalnya karyawan sedang istirahat – notaris dapat membuat sendiri akta penyimpanan surat wasiat atau menunggu hingga karyawan kembali bahkan bila karyawan seluruhnya telah pulang, dapat dilakukan keesokan

⁴¹ Komar Andasasmita., *Op. cit.*, hlm. 347.

⁴² Wawancara dengan notaris-notaris responden tanggal 25, 27 dan 28 Juni 2005.

⁴³ Anief Ratnawati, SH., *Op. cit.*

harinya. Hal tersebut menurutnya lebih aman daripada akta penyimpanan dibuat oleh orang lain.⁴⁴

Adapun tata cara membuat dan menyelesaikan akta penyimpanan surat wasiat adalah sebagai berikut :

- Jika surat wasiat itu disampaikan dalam keadaan terbuka, maka akta penyimpanannya ditulis pada bagian paling bawah (*aan de voet*) dari surat wasiat itu.
Bila tempat untuk membubuhkan kata-kata penyimpanan ternyata kurang, ada beberapa jalan, yakni wasiat itu ditulis (kembali) di atas kertas yang lebih luas (lebar), a.l. menurut Opzoomer, Land, Veegens dan Punt, sedangkan menurut penulis-penulis lain, seperti Diephuis, kertas yang mengandung wasiat itu sebaiknya dibubuhi / ditempeli kertas lain (*op een aan te hechten vel papier te voltooien*).
- Jika wasiat itu disimpan (kembali) secara tertutup dan disegel, maka akta penyimpanannya dibuat secara tersendiri (*afzonderlijk*).⁴⁵

Notaris Yulli S. Fachruddin, SH menggunakan kertas lain yang ditempel pada surat wasiat yang disampaikan dalam keadaan terbuka, karena lebih praktis sedangkan notaris responden lainnya menggunakan kertas lain yang lebih lebar / luas dan memohon pada pewaris untuk menyalin kembali isi wasiat yang telah ditulisnya tersebut ke atas kertas baru yang lebih lebar tersebut.⁴⁶

Terhadap surat wasiat yang diserahkan dalam keadaan tertutup dan tersegel, Notaris Titi Herawati, SH. MHum lebih memilih untuk menempelkan kertas lain yang dibuat secara tersendiri sebagai akta penyimpanan, namun Kustiana

⁴⁴ Medania Aristanstini, SH., *Op. cit.*

⁴⁵ Komar Andasasmita, *Op. cit.*, hlm. 347.

⁴⁶ Wawancara dengan notaris-notaris responden tanggal 25, 27 dan 28 Juni 2005.

Haryoto, SH dan Yulli S. Fachruddin, SH lebih memilih untuk menuliskan akta penyimpanan langsung di atas sampul surat.⁴⁷

Para ahli hukum tidak mempunyai pendapat yang sama mengenai dimana penulisan akta penyimpanan harus dilakukan, namun umumnya berpendapat semua cara dapat digunakan sepanjang undang-undang tidak melarangnya atau mengatur secara jelas. Yang utama menurut Diephuis, Suyling dan Dunois dari akta-akta itu harus ternyata bahwa pewaris mencatat di atas sampul surat dan menandatangani.⁴⁸

Yang perlu dimuat oleh notaris dalam akta penyimpanan dalam hal pewaris karena sesuatu hal tidak dapat menandatangani surat wasiat atau sampul surat wasiat adalah catatan yang menerangkan di atas sampul atau akta penyimpanan tentang adanya halangan yang mengakibatkan pewaris tidak dapat menandatangani sampul dan / atau akta penyimpanan tersebut (Pasal 932 ayat 4 KUH Perdata).

Keterangan tentang ketidakmampuan pewaris untuk menanda tangani sampul surat wasiat dan / atau akta penyimpanan wajib dilakukan notaris secara hati-hati karena menurut notaris Anief Ratnawati, SH, hal tersebut dikemudian hari dapat menjadi sarana untuk mengetahui apakah isi wasiat benar-benar dibuat oleh pewaris atau hanya rekayasa notaris dan pewaris berlaka.⁴⁹

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Komar Andasamita, Op. cit., hlm. 348.

⁴⁹ Anief Ratnawati, SH., Op. cit.

Menurut Medania Aristantini, SH, keterangan tentang alasan pewaris tidak dapat menanda tangani sampul surat dan / atau akta penyimpanan, wajib dilakukan notaris berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dihadapan 2 (dua) orang saksi yang benar-benar dipercaya notaris, karena itu dalam hal ini benar-benar dibutuhkan kehati-hatian notaris.⁵⁰

c. Wasiat Rahasia

Mengenai wasiat rahasia (*geheim, mystiek testament*) diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUH Perdata.

Syarat wasiat rahasia adalah dapat / boleh ditulis oleh pewaris sendiri atau orang lain, asalkan ditanda tangani sendiri oleh pewaris (pribadi). Penanda tangan merupakan syarat yang tidak dapat dihilangkan / dihindari, sehingga seseorang yang tidak bisa melakukan penanda tangan, tidak mungkin membuat wasiat rahasia.⁵¹

Mengenai tanda tangan pewaris, notaris Yulli S. Fachruddin, SH mensyaratkan agar pewaris benar-benar dapat menanda tangani surat wasiat, namun notaris Anief Ratnawati, SH dapat menerima bila pewaris hanya sekedar memberikan coretan yang hanya dimengerti olehnya sendiri sebagai pengganti tanda tangannya.⁵²

⁵⁰ Medania Aristantini, SH. Op. cit.

⁵¹ Komar Andasmita, Op. cit., hlm. 353.

⁵² Yulli S. Fachruddin, SH dan Anief Ratnawati, SH., Op. cit.

Pasal 940 ayat (1) KUH Perdata mensyaratkan agar kertas yang memuat surat wasiat pewaris atau kertas yang dipakai sebagai sampul harus tertutup dan tersegel.

Medania Aristantini, SH dapat menerima bila sampul yang diserahkan belum tertutup dan tersegel, namun ia akan menanyakan pada pewaris tentang jenis wasiat yang akan dibuat bila pewaris menghendaki wasiat rahasia, maka ia akan menutup dan menyegel surat wasiat dihadapan pewaris dan saksi-saksi tanpa melihat isi atau bunyi wasiat.⁵³

Pasal 940 ayat (2) KUH Perdata selanjutnya mensyaratkan bahwa surat wasiat wajib disampaikan oleh pewaris pada notaris dalam keadaan tertutup dan tersegel dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi dimana pada saat penyampaian tersebut pewaris harus menerangkan bahwa kertas yang bersangkutan mengandung wasiatnya dan menegaskan bahwa dia sendiri atau orang lain yang menulis (bila ditulis orang lain, tidak usah disebutkan siapa) dan ia sendiri yang menanda tangannya.

Titi Herawati, SH. MHum menyetujui bahwa surat wasiat rahasia wajib diserahkan sendiri oleh yang bersangkutan, namun menyayangkan undang-undang tidak mengatur tentang tempat surat wasiat diserahkan. Apakah karena diserahkan oleh pewaris sehingga pewaris yang wajib hadir dihadapan notaris atau dapat notaris yang datang ke tempat pewaris atau penyerahan surat wasiat

⁵³ Medania Aristantini, SH., Op. cit.

boleh dilakukan di tempat lainnya yang ditentukan bersama, asalkan notaris dan pewaris berhadap-hadapan.⁵⁴

Menurut Kustiana Haryoto, SH, bunyi undang-undang wajib ditafsirkan dalam keadaan normal yaitu bahwa pewaris datang menghadap notaris di kantor notaris. Namun ia tidak menolak dan menganggap tidak melanggar ketentuan undang-undang bila notaris yang mendatangi pewaris dalam keadaan tertentu – misalnya pewaris sakit keras dan tidak dapat berdiri dan bangun dari tempat tidur – asalkan penyampaian surat wasiat dilakukan dihadapan 4 (empat) orang saksi.⁵⁵

Tentang 4 (empat) orang saksi – karena tidak diatur dalam undang-undang, maka menurut Yulli S. Fachruddin, SH, saksi dapat berasal dari notaris maupun pewaris, yang penting seluruh saksi-saksi tersebut wajib memenuhi syarat sebagai saksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵⁶

Notaris atas penerimaan surat wasiat dalam keadaan tertutup dan tersegel wajib segera membuat akta yang memuat keterangan di atas sampul (atau lembaran luar) surat wasiat rahasia tertutup yang disebut *akte van superscriptie* (akta pengalamatan surat wasiat) yang harus ditanda tangani oleh pewaris, notaris dan ke 4 (empat) saksi. Dalam akta itu oleh notaris akan dicatat pula apabila pembuat wasiat menerangkan / menyatakan bahwa ia berhalangan

⁵⁴ Medania Aristantini, SH., Op. cit.

⁵⁵ Kustiana Haryoto, SH., Op. cit.

⁵⁶ Yulli S. Fachruddin, SH., Op. cit.

menanda tangani akta superskripsi tersebut, sehingga pembubuhan halangan serta alasannya itu (seakan-akan) menggantikan tanda tangan pewaris.⁵⁷

Para notaris responden mengakui bahwa setelah menerima surat wasiat rahasia, notaris wajib membuat “akte pengalamatan surat wasiat” (*akte an superscriptie*) namun berbeda pendapat tentang makna “segera”.⁵⁸

Menurut Medania Aristantini, SH, notaris wajib membuat akta pengalamatan surat wasiat maksimum pada hari yang sama dengan hari surat wasiat diserahkan pada notaris. Lebih baik pada jam yang sama.⁵⁹

Anief Ratnawati, SH mengartikan “segera” dengan membuat akta pengalamatan pada saat yang sama dengan penerimaan surat wasiat tanpa diselingi pembuatan akta lainnya asalkan seluruh syarat-syarat surat wasiat benar-benar telah dipenuhi oleh pewaris.⁶⁰

Tentang saksi dalam pembuatan akta wasiat umum, akta penyimpanan surat wasiat olografis dan akta pengalamatan surat wasiat rahasia diatur dalam Pasal 40 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut :

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah ;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum ;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta ;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf ; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

⁵⁷ Komar Andasmita, Op. cit., hlm. 354.

⁵⁸ Wawancara dengan notaris-notaris responden tanggal 25, 27 dan 28 Juni 2005.

⁵⁹ Medania Aristantini, SH., Op. cit.

⁶⁰ Anief Ratnawati, SH., Op. cit.

Selain dari pada itu, saksi menurut Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

Notaris Yulli S. Fachruddin, SH berpendapat bahwa syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sudah cukup memenuhi kebutuhan di lapangan. Namun dilain pihak, notaris Titi Herawati, SH. MHum beranggapan bahwa usia 18 tahun merupakan usia yang terlalu muda bagi seseorang untuk dijadikan sebagai saksi, sehingga ia lebih memilih saksi dengan usia yang lebih tua dari yang telah ditentukan undang-undang.⁶¹

Mengenai tanggal yang berlaku dalam surat wasiat olografis dan surat wasiat rahasia, adalah tanggal dimana akta penyimpanan dan akta pengalamatan dibuat dan bukan pada tanggal dimana pewaris menulis atau menanda tangani surat wasiat.⁶²

Tentang tanggal berlakunya wasiat adalah pada tanggal dibuatnya akta penyimpanan dan akta pengalamatan disetujui oleh seluruh para notaris responden, namun notaris Titi Herwati, SH. MHum mengartikan sebagai tanggal akta di tanda tangani secara lengkap oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi.⁶³

Mengenai peran notaris dalam membuat dan menyimpan surat wasiat diakui oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sangat besar peranannya, dimana seorang

⁶¹ Yulli S. Fachruddin, SH dan Titi Herawati, SH. MHum. MHum, Op. cit.

⁶² Komar Andasasmita, Op. cit.

⁶³ Wawancara dengan notaris-notaris responden tanggal 25, 27 dan 28 Juni 2005.

notaris wajib memastikan bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang terhadap sahnya suatu surat wasiat telah dipenuhi oleh pewaris.⁶⁴

Pengaturan tentang pembuatan dan penyimpanan surat wasiat oleh notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta otentik diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan secara khusus dalam KUH Perdata.

Menurut KUH Perdata, suatu wasiat agar dapat berlaku secara sah harus memenuhi syarat formil yang menyangkut subyek dan obyek wasiat serta syarat materiil yang menyangkut isi wasiat.

Dalam praktek, para notaris berperan untuk memeriksa dalam setiap tahap pembuatan atau penyimpanan surat wasiat apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan KUH Perdata dan membantu pewaris dalam memenuhi syarat-syarat tersebut.

Syarat-syarat yang ditentukan oleh KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris umumnya ditaati oleh seluruh notaris responden, karena bila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan akta yang dibuat atau disimpan notaris menjadi akta dibawah tangan atau hilang otentisitasnya.

Adapun syarat-syarat yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh para notaris adalah syarat-syarat yang tidak diatur secara mutlak oleh undang-undang namun undang-undang hanya memberikan batasan umum yang tidak dapat dilanggar notaris apabila menghendaki akta yang dibuatnya tidak kehilangan otentisitas. Syarat-syarat tersebut antara lain mengenai siapa yang dapat menjadi saksi dalam akta, cara

⁶⁴ Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 28 Juli 2005.

penempelan atau pembuatan akte penyimpanan serta penerimaan surat wasiat dalam keadaan tertutup namun belum tersegel.

Dalam menghadapi hal-hal tersebut, para notaris menggunakan upaya-upaya secara bertahap melalui pemberian nasehat hukum kepada pewaris dan apabila pewaris tidak bersedia mengikuti nasehat notaris dan bertetap pada pendiriannya maka notaris mengikuti kehendak pewaris dengan sedapat mungkin wasiat yang dibuat oleh notaris dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Menjadi kendala bagi notaris dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan pewasiat melanggar syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak dalam hal-hal yang tidak nampak nyata dan sukar bagi notaris untuk menentukan selama waktu pewaris menghadap notaris. Antara lain masalah latar belakang dibuatnya surat wasiat apakah benar-benar dilaksanakan tanpa adanya penipuan, paksaan atau kekeliruan. Dimana dalam hal ini notaris bertindak berdasarkan pengamatannya saja selama penghadap datang menghadap notaris karena notaris tidak berwenang melakukan penilaian terlalu mendalam mengenai hal tersebut. Seandainya di kemudian hari timbul masalah mengenai hal tersebut, maka notaris akan mendasarkan dalilnya pada apa yang dilihat, didengar dan diketahui notaris pada saat pewasiat menghadap.

Masalah lainnya adalah tentang penilaian notaris tentang kedewasaan pewasiat. Hal mana disebabkan undang-undang mensyaratkan umur minimal bagi pewasiat adalah 18 tahun atau sudah menikah. Di mana dalam hal ini notaris dapat mendasarkan pada pemeriksaan yang dilakukannya secara teliti dan seksama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pewaris dan tingkah laku penghadap selama menghadap notaris.

Hal lainnya adalah mengenai kebenaran mengenai harta yang akan diwasiatkan oleh pewasiat adalah benar-benar milik pewasiat. Sehingga dalam hal ini peran saksi dalam pembuatan surat wasiat dibutuhkan bukan sekedar mengenai identitas pewasiat namun juga kebenaran tentang harta yang akan disebutkan dalam surat wasiat adalah benar-benar milik pewasiat dan bukan milik orang lain.

Atas dasar tersebut, syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata dalam pembuatan surat wasiat oleh notaris sebaiknya dapat diikuti oleh peraturan pelaksanaan atau apabila tidak memungkinkan adalah melalui diskusi dan musyawarah organisasi notaris yang disebar luaskan pada anggota sehingga dalam pembuatan surat wasiat sampai hal yang sedetil-detilnya telah diatur sehingga terdapat keseragaman dalam pembuatan surat wasiat yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan kepada notaris.

B. Akibat Hukum Apabila Notaris Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagai Penyimpan Surat Wasiat

Wasiat yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta otentik, karena dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum, sedangkan wasiat olografis dan wasiat rahasia dapat menjadi akta otentik apabila surat wasiat :

... diserahkan kepada notaris untuk disimpan.⁶⁵

Sebagai penyimpan surat wasiat, notaris mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, i dan j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk :

⁶⁵ Ibid., hlm. 346 dan 354.

- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan ;
- i. mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya ;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap akhir bulan ;

Apabila notaris tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 16 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebabkan akta bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, i dan j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berupa :

- a. teguran lisan ;
- b. teguran tertulis ;
- c. pemberhentian sementara ;
- d. pemberhentian dengan hormat ; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi terhadap akta dan terhadap notaris apabila melalaikan kewajibannya tersebut, menurut notaris Kustiana Haryoto, SH adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan, karena notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak mengindahkan kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pewaris.⁶⁶

⁶⁶ Kustiana Haryoto, SH., Op. cit.

Notaris Anief Ratnawati, SH setuju dengan sanksi tersebut baik terhadap akta yang dibuat atau disimpan notaris maupun terhadap notaris bersangkutan, hanya ia menyayangkan sampai saat ini majelis yang akan menerapkan sanksi-saksi tersebut belum dibentuk dengan semestinya, sehingga terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut belum dapat dikenakan sanksi.⁶⁷

Selain kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewajiban notaris lainnya terhadap surat wasiat yang dibuat atau disimpannya diatur dalam Pasal 942 KUH Perdata yang mengatur mengenai penyerahan surat wasiat olografis dan surat wasiat rahasia kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk dibuka setelah pewaris meninggal dunia. BHP setelah membuka surat wasiat tersebut dengan membuat acara tentang penerimaan dan pembukaan surat wasiat selanjutnya akan mengembalikannya kepada notaris yang menyampaikan surat wasiat tersebut.

Kewajiban lainnya setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 943 KUH Perdata adalah kewajiban notaris untuk memberitahukan kepada semua mereka yang berkepentingan tentang adanya surat-surat wasiat yang berbentuk apapun (umum, olografis dan rahasia) dan yang tersimpan dalam protokol notaris.

Yang dimaksud dengan “mereka yang berkepentingan” dalam hal ini, pertama-tama tentu mereka yang diangkat sebagai ahli waris, legataris dan yang diuntungkan karena adanya suatu beban (*lastbevoordeelden*) kemudian juga anak-anak atau

⁶⁷ Anief Ratnawati, SH., *Op. cit.*

keluarga sedarah dan sebagainya dari mereka, ahli waris ab intestao dan lain-lain tersebut.⁶⁸

Kewajiban-kewajiban yang diatur berdasarkan KUH Perdata tersebut tidak disebutkan sanksinya. Namun menurut notaris Yulli S. Fachruddin, SH, apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar oleh notaris maka kepada notaris dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁶⁹

Notaris Medania Aristantini, SH berpendapat bahwa apabila notaris tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan KUH Perdata, selain dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁷⁰

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, bila notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat umum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang – termasuk dalam membuat dan menyimpan surat wasiat - dahulu sanksi akan diberikan oleh Pengadilan Negeri. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, wewenang tersebut berada pada Majelis Pengawas.⁷¹

Dalam hal notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pembuat atau penyimpan surat wasiat, maka tidak hanya akta yang dibuat atau disimpan oleh notaris

⁶⁸ Komar Andasasmita., *Op. cit.*, hlm. 359.

⁶⁹ Yulli S. Fachruddin, SH., *Op. cit.*

⁷⁰ Medania Aristantini, SH., *Op. cit.*

⁷¹ Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, *Op. cit.*

akan menjadi akta dibawah tangan, namun notaris yang melalaikan kewajibannyapun akan dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang diancam tersebut sudah maksimal, namun dalam pelaksanaannya sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris belum dapat diterapkan secara maksimal bahkan belum dapat diterapkan sama sekali disebabkan badan yang berwenang untuk itu yakni Majelis Pengawas baik Daerah, Wilayah dan Pusat belum dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Para Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Notaris Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagai Penyimpan Surat Wasiat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selain mengatur tentang sanksi baik terhadap akta maupun terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan akta baik akta umum maupun akta wasiat, mengatur pula tentang bentuk ganti kerugian yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan notaris.

Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

... apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Menurut Titi Herawati, SH. MHum, upaya yang dapat dilakukan oleh para ahli waris atau pihak lain yang merasa dirugikan dapat dilakukan secara langsung kepada notaris yang mengakibatkan kerugian secara musyawarah, selanjutnya apabila upaya

tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah, yang bersangkutan dapat melaporkan ke organisasi notaris atau kepada Majelis Pengawas Daerah dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, selanjutnya apabila tidak berhasil juga, maka notaris bersangkutan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.⁷²

Mengenai jangka waktu mengajukan tuntutan, notaris Anief Ratnawati, SH menyatakan tidak ada batas, asalkan dilakukan sesegera mungkin setelah akibat akta diketahui baik oleh pewaris maupun oleh para ahli waris.⁷³

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa apabila ada pihak yang dirugikan, sebaiknya diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, bila memang tidak bisa diselesaikan, maka upaya terakhir adalah melalui Pengadilan Negeri.⁷⁴

Upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat surat wasiat berlaku sebagai akta di bawah tangan atau bahkan akta yang batal demi hukum disebutkan dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun tidak disebutkan mengenai batas tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan kepada notaris sehingga hal tersebut dapat menimbulkan tuntutan ganti kerugian yang terlalu besar kepada notaris yang tentunya akan sangat merugikan notaris dan menimbulkan rasa was-was bagi notaris. Sehingga ada baiknya apabila masalah ganti kerugian terhadap notaris diatur peraturan pelaksanaannya.

⁷² Titi Herawati, SH. MHum., Op. cit.

⁷³ Anief Ratnawati, SH., Op. cit.

⁷⁴ Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, Op. cit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran notaris sebagai penyimpan surat wasiat agar suatu surat wasiat berlaku sebagai akta otentik adalah memeriksa dan memastikan bahwa dalam setiap tahap surat wasiat dari tahap pembuatan, penerimaan dan penyimpanan surat wasiat sudah memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan oleh KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
2. Akibat hukum apabila Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat adalah :
 - a. Akta yang dibuat atau disimpan notaris menjadi akta dibawah tangan demi hukum atau akta batal demi hukum.
 - b. Notaris yang membuat atau menyimpan surat wasiat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat ; atau pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Upaya yang dapat ditempuh oleh para ahli waris yang dirugikan akibat notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat dapat dilakukan secara langsung kepada notaris yang mengakibatkan kerugian secara musyawarah, selanjutnya apabila upaya tersebut belum menyelesaikan masalah, yang bersangkutan dapat melaporkan kepada organisasi notaris atau kepada Majelis Pengawas Daerah dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan

Majelis Pengawas Pusat, selanjutnya apabila belum berhasil juga, maka notaris bersangkutan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.

B. Saran

1. Karena dalam pembuatan surat wasiat atau penyimpanan surat wasiat, notaris wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUH Perdata, maka kepada organisasi profesi notaris diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pelatihan berdasarkan pengalaman-pengalaman notaris senior tentang upaya notaris dalam menjalankan peran sebagai pembuat wasiat, terutama untuk mengetahui dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang tidak dapat segera diketahui oleh notaris dalam kesempatan pertama pewasiat menghadap notaris, antara lain masalah kedewasaan dan motivasi pewaris membuat surat wasiat.
2. Kepada Menteri Hukum dan HAM RI agar segera membentuk dan melantik Majelis Daerah sebagai badan pengawas Notaris sehingga dapat sesegera mungkin menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris bagi para notaris yang melalaikan kewajibannya sebagai pembuat dan penyimpan surat wasiat.
3. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, kepada Departemen Hukum dan HAM RI agar dapat mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya mengenai batas besarnya tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang dapat diajukan kepada notaris akibat kerugian yang ditimbulkan notaris yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi

pihak yang dirugikan maupun bagi notaris sehingga notaris dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan peranan dan fungsinya agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

4. Mengingat perkembangan dunia kenotariatan semakin pesat termasuk dalam bidang wasiat dimana kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi, maka notaris sebaiknya selalu menambah pengetahuannya dalam hal ini khusus mengenai wasiat sehingga dapat dihindari akibat hilangnya otentisitas wasiat akibat kurang pengetahuan oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Kohar, Nota ris Berkounikasi, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Ali Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- A. Pitlo alih bahasa oleh M. Isa Arief, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I, Intermasa, Jakarta, 1994.
- _____, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jilid II, Intermasa, Jakarta, 1991.
- Asis Safioedin, Beberapa Hal Tentang Burgelijk Wetboek, Alumni, Bandung, 1986.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teori dan Praktek), Tarsito, Bandung, 1988.
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.
- Gregor van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, Hukum Waris - Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hartono Soerjopratiknyo, Hukum Waris Testamentair, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.
- H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988.
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Ignatius Ridwan Widyadarma, et al., Etika Profesi Hukum, Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- J.A van Mourik diterjemahkan oleh F. Tengker, Studi Kasus Hukum Waris, Eresco, Bandung, 1993.

- J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992.
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni, Bandung, 1986.
- Liliana Tedjosaputro, Hukum Waris Menurut Surat Wasiat (Ad Testamento), Agung Press, Semarang, 1991.
- , Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijke Wetboek), Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Padmo Wahyiono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- , Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, 1999 / 2000.
- R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Pres, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.
- S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1992.
- Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris Menurut BW, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.